



***Tabayyun* di Era Digital: Integrasi Moralitas Islam dan Falsifikasi Popper dalam Menghadapi Hoaks**

Mahardhika Muhammad¹, Muhammad Akmansyah², Abd Rahman Hamid³, Idrus Ruslan⁴, Muslimin⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3,4,5}

Email: maherdhika81@gmail.com¹
akmansyah@radenintan.ac.id²
rahmanhamid@radenintan.ac.id³
idrus.ruslan@radenintan.ac.id⁴
muslimin@radenintan.ac.id⁵

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Hoaks digital menjadi problem serius dalam masyarakat kontemporer karena tidak hanya menyebarkan informasi palsu, tetapi juga membentuk klaim pengetahuan yang tampak benar tanpa dasar epistemik yang memadai. Urgensi masalah ini terlihat di Indonesia, di mana verifikasi hoaks sepanjang 2025 menunjukkan penyebaran yang konsisten melalui berbagai platform media sosial. Penelitian ini bertujuan merumuskan kritik epistemik-etis Islam terhadap hoaks digital melalui integrasi teori falsifikasi Karl Popper dan moralitas Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan filosofis-konseptual. Sumber data meliputi karya Karl Popper, literatur mutakhir mengenai misinformasi dan disinformasi, serta sumber-sumber Islam yang membahas tabayyun, sidq, amanah, dan larangan dusta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks merupakan klaim pseudo-epistemik yang gagal memenuhi syarat pengetahuan karena tidak didukung verifikasi yang memadai dan tidak terbuka terhadap koreksi. Teori falsifikasi Popper berfungsi sebagai instrumen kritik epistemologis dengan menguji suatu klaim melalui kemungkinan salah dan keterbukaannya terhadap bantahan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab dimensi tanggung jawab moral dalam penyebaran informasi. Moralitas Islam melengkapi kritik tersebut melalui prinsip verifikasi, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan hoaks digital memerlukan integrasi antara pengujian rasional terhadap klaim dan tanggung jawab etis subjek informasi. Kerangka ini berkontribusi pada pengembangan etika informasi Islam dalam merespons tantangan hoaks di era digital.

Kata Kunci: hoaks digital; falsifikasi; moralitas Islam; *tabayyun*; etika informasi Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi digital telah secara fundamental mengubah lanskap perolehan, produksi, dan diseminasi informasi di tengah masyarakat. Kehadiran media sosial, aplikasi

percakapan, dan beragam platform digital lainnya memungkinkan informasi untuk mengalir dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sering kali melampaui peran institusi pengetahuan tradisional yang sebelumnya

berfungsi sebagai gerbang penyaring. Di satu sisi, perkembangan ini secara signifikan memperluas akses publik terhadap pengetahuan. Namun di sisi lain, ruang digital yang sama juga melahirkan persoalan serius berupa proliferasi hoaks, misinformasi, dan disinformasi, yang pada gilirannya mengaburkan batas antara fakta, opini, keyakinan personal, dan manipulasi terencana. Fenomena seperti misinformasi, disinformasi, dan fake news tidak dapat dipahami secara monolitik karena kompleksitasnya melibatkan aspek produksi pesan, intensi penyebaran, penerimaan audiens, serta dampaknya yang luas terhadap dinamika sosial dan politik (Broda & Strömbäck, 2024). Dalam konstelasi ini, hoaks tidak lagi sekadar menjadi isu komunikasi, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah problem epistemologis yang mendasar karena secara langsung menyangkut status kebenaran dari klaim yang beredar di ranah publik.

Urgensi untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam di konteks Indonesia diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan tren verifikasi hoaks yang berlangsung secara konsisten. Sebuah analisis terhadap 1.000 artikel hoaks dari TurnBackHoax.id selama periode Januari hingga Agustus 2025 menggunakan teknik web scraping memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena tersebut (Gili & Maddalena, 2022). Hasil studinya menunjukkan fluktuasi volume hoaks yang diverifikasi, dengan angka yang relatif stabil di kisaran 80–115 kasus per bulan dari Januari hingga Juni 2025, kendati tercatat sedikit penurunan pada bulan Februari, April, dan Mei. Puncaknya tercatat pada Juli 2025, di mana volume hoaks melonjak hingga mencapai sekitar 140–145 kasus, sebelum akhirnya menurun kembali ke angka sekitar 100 kasus pada Agustus 2025. Lebih lanjut, pada kategori hoaks “Salah”, Facebook menempati posisi sebagai sumber dominan, menyumbang 42,88%, yang diikuti oleh Twitter/X (22,70%), TikTok (16,32%),

Instagram (8,75%), YouTube (7,86%), dan WhatsApp (1,48%). Pola serupa juga ditemukan pada kategori “Belum Terbukti”, di mana Facebook tetap menjadi kontributor terbesar (37,50%), disusul oleh Instagram (25,00%), sementara TikTok, Twitter/X, dan WhatsApp masing-masing berkontribusi sebesar 12,50%. Data ini mengonfirmasi bahwa hoaks digital di Indonesia bukanlah fenomena insidental, melainkan sebuah problem yang persisten dan sistemik yang menyebar melalui platform-platform media sosial utama.

Karakteristik hoaks digital melampaui sekadar informasi palsu dalam pengertian konvensional. Hoaks sering kali tidak tampil sebagai kebohongan telanjang yang mudah diidentifikasi, melainkan menyamarkan dirinya dalam format yang meniru struktur dan format pengetahuan yang absah. Ia dapat memanfaatkan format berita, mengutip figur otoritatif, menyajikan data statistik, gambar, video, atau bahkan merujuk pada sumber tertentu untuk menciptakan ilusi kredibilitas. Disinformasi sering kali memanfaatkan klaim objektivitas, rujukan kepada pakar, serta penggunaan istilah “fakta” secara strategis guna membangun persepsi kredibilitas dan meyakinkan audiens (Hameleers & van der Goot, 2025). Dengan demikian, permasalahan inti dari hoaks tidak hanya terletak pada kontennya yang keliru, tetapi juga pada metode presentasinya yang secara sengaja dirancang untuk tampak benar. Dalam kerangka inilah hoaks dapat dipahami sebagai klaim *pseudo*-epistemik: sebuah pernyataan yang meniru wujud pengetahuan namun gagal memenuhi syarat-syarat epistemik fundamental, seperti sumber yang dapat diverifikasi, justifikasi yang logis dan memadai, serta keterbukaan terhadap pengujian dan koreksi.

Krisis yang ditimbulkan oleh hoaks digital juga berkelindan erat dengan pergeseran paradigma masyarakat dalam memperlakukan kebenaran. Dalam ekosistem digital yang serba cepat dan terfragmentasi, sebuah informasi sering kali diterima dan

dipercaya bukan karena telah melalui proses uji rasional yang ketat, melainkan karena kesesuaiannya dengan sentimen emosional, penguatan identitas kelompok, afinitas ideologis, atau keyakinan yang sudah tertanam sebelumnya (Waston, 2025). Situasi ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari *the fragility of truth* (rapuhnya kebenaran) dalam masyarakat yang terpolarisasi, yaitu kondisi ketika validitas suatu klaim pengetahuan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan bukti yang mendukungnya, melainkan oleh kedekatan sosial dan afiliasi kepercayaan (Kirmayer, 2024). Senada dengan itu, Era pasca-kebenaran (*post-truth*) ditandai oleh semakin problematisnya hubungan antara realitas objektif, keyakinan subjektif, dan komunikasi publik, sehingga batas antara fakta dan interpretasi menjadi semakin kabur (Gili & Maddalena, 2022). Oleh karena itu, upaya membantah hoaks tidak akan memadai jika hanya berhenti pada level klarifikasi faktual; kritik yang lebih fundamental perlu diarahkan pada fondasi epistemologis yang menjadi dasar mengapa suatu klaim dianggap layak dipercaya atau sebaliknya patut dicurigai.

Filsafat ilmu modern, khususnya melalui pemikiran Karl Popper, menawarkan sebuah kerangka kerja yang relevan untuk menguji klaim-klaim pengetahuan. Popper secara fundamental menolak pandangan positivistik bahwa pengetahuan berkembang melalui akumulasi verifikasi atau pencarian pembenaran final. Bagi Popper, kemajuan ilmu pengetahuan tidak ditopang oleh upaya pembuktian, melainkan oleh proses kritik, pengujian yang keras, dan keterbukaannya untuk disangkal. Sebaliknya, kekuatan sebuah teori atau klaim ilmiah tidak diukur dari seberapa banyak ia dapat dibenarkan, tetapi dari kemampuannya untuk bertahan setelah dihadapkan pada upaya-upaya falsifikasi yang paling kritis sekalipun (Popper, 2002). Prinsip falsifikasi ini memiliki relevansi yang tinggi untuk menganalisis hoaks, karena hoaks pada dasarnya bertahan melalui mekanisme

pembenaran sepihak, repetisi, bujukan emosional, dan penolakan kategoris terhadap segala bentuk koreksi. Dengan menerapkan prinsip falsifikasi, pertanyaan kritis bergeser dari “apa bukti yang mendukung klaim ini?” menjadi “bukti atau kondisi apa yang dapat menunjukkan bahwa klaim ini keliru?”

Upaya menerapkan falsifikasi Popper sebagai pendekatan dalam menghadapi hoaks telah mulai digagas dalam beberapa penelitian terdahulu. Urgensi teori falsifikasi sebagai bekal bagi para guru dalam merespons maraknya penyebaran berita hoaks di media sosial semakin penting dalam konteks pendidikan kontemporer (Oka, 2024). Kajian tersebut memperlihatkan bagaimana prinsip falsifikasi dapat membekali pembaca informasi untuk tidak menerima sebuah klaim secara dogmatis, melainkan secara aktif mengujinya melalui pencarian kemungkinan sanggahan dan pemeriksaan kritis. Namun, penelitian-penelitian semacam itu cenderung memosisikan falsifikasi sebatas sebagai instrumen berpikir kritis yang ditujukan pada objek klaim informasi. Padahal, persoalan hoaks digital tidak hanya menyangkut apakah suatu klaim dapat diuji atau dibantah, tetapi juga menyentuh aspek tanggung jawab moral subjek individu manusia yang menerima, memercayai, dan pada akhirnya turut menyebarkan informasi tersebut. Dengan kata lain, meskipun falsifikasi efektif dalam membongkar kelemahan epistemik dari sebuah hoaks, ia belum secara komprehensif menjawab dimensi etis dari tindakan penyebarannya.

Kekosongan pada dimensi etis inilah yang kemudian dapat diisi oleh moralitas Islam, yang memandang informasi bukan sebagai entitas yang netral secara moral. Dalam perspektif Islam, aktivitas menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi terikat erat dengan nilai-nilai luhur seperti amanah (kepercayaan), *sidq* (kejujuran), kehati-hatian, serta tanggung jawab sosial. Prinsip *tabayyun*, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Hujurāt ayat 6, secara eksplisit memerintahkan agar setiap informasi yang

diterima diperiksa terlebih dahulu kebenarannya sebelum dijadikan landasan untuk bertindak. Ayat ini menekankan signifikansi verifikasi guna mencegah seseorang dari menimpakan kerugian atau musibah kepada pihak lain atas dasar ketidaktahuan. Implementasi *tabayyun* dalam konteks digital kontemporer mencakup selektivitas terhadap informasi, verifikasi sumber yang kredibel, kehati-hatian dalam transmisi pesan, serta pertimbangan mendalam terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan (Jazilah et al., 2026) Dengan demikian, *tabayyun* berfungsi bukan hanya sebagai prosedur klarifikasi, melainkan sebagai sebuah prinsip etik-epistemik yang holistik dalam memperlakukan informasi.

Melengkapi prinsip *tabayyun*, moralitas Islam juga memberikan penekanan kuat pada prinsip *sidq* dan amanah. *Sidq* menuntut adanya kejujuran mutlak dalam penyampaian informasi, sementara amanah menuntut kesadaran akan tanggung jawab untuk memperlakukan informasi sebagai titipan yang memiliki konsekuensi sosial. Dalam konteks hoaks, kedua prinsip ini menjadi landasan kritik terhadap budaya digital yang serba instan, yang sering kali mendorong penyebaran informasi secara gegabah tanpa proses pemeriksaan yang memadai. Etika media digital dalam kerangka nilai-nilai Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan informasi palsu sebagai ancaman yang berpotensi merusak akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan stabilitas sosial (Riyanto & Firdiansyah, 2025). Demikian juga dengan Al-Qur'an yang telah memberikan perhatian serius terhadap bahaya berita palsu karena dampaknya yang dapat memicu prasangka, merusak hubungan sosial, dan mencederai martabat manusia (Istiqomah et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa dari sudut pandang Islam, penyebaran hoaks bukan semata-mata kesalahan informatif, melainkan sebuah pelanggaran moral yang serius.

Berpijak pada pemaparan di atas, dapat diidentifikasi sebuah kesenjangan penelitian yang signifikan. Kajian mengenai hoaks telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, seperti komunikasi, politik, studi media digital, dan literasi informasi. Di sisi lain, falsifikasi Popper telah diaplikasikan sebagai alat untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap hoaks, sementara kajian Islam tentang hoaks umumnya berfokus pada pentingnya *tabayyun*, kejujuran, dan larangan menyebarkan berita bohong. Namun, belum ditemukan adanya kajian yang secara spesifik berupaya mensintesis kerangka falsifikasi Popper dan moralitas Islam menjadi sebuah bangunan kritik epistemik-etis yang terpadu terhadap hoaks digital. Padahal, sintesis semacam ini menjadi krusial mengingat hoaks mengandung dua dimensi yang tak terpisahkan: dimensi epistemologis yang termanifestasi dalam klaim yang tidak teruji, dan dimensi etis yang melekat pada tanggung jawab subjek yang menyebarkannya.

Artikel ini, dengan demikian, bertujuan untuk merumuskan sebuah kritik epistemik-etis Islam terhadap fenomena hoaks digital melalui sintesis antara falsifikasi Popper dan moralitas Islam. Argumen sentral yang diajukan adalah bahwa kritik yang komprehensif terhadap hoaks tidak cukup hanya berhenti pada pengujian validitas klaim, tetapi harus diperluas untuk mencakup penilaian terhadap tanggung jawab moral setiap individu dalam siklus informasi. Falsifikasi Popper berperan sebagai instrumen untuk menguji sebuah klaim melalui keterbukaannya terhadap sanggahan, sementara moralitas Islam melengkapinya dengan menyediakan landasan etis melalui prinsip *tabayyun*, *sidq*, amanah, serta orientasi pada kemaslahatan umum. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi sebuah kritik epistemik-etis Islam, yaitu sebuah kerangka kerja yang secara sinergis memadukan pengujian rasional terhadap klaim informasi dengan penegakan

tanggung jawab moral subjek dalam menghadapi tantangan hoaks digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan metode yang menempatkan literatur sebagai sumber utama data penelitian melalui proses pengumpulan, pengkajian, dan interpretasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian (Jamaluddin et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian artikel bukan berupa perilaku empiris responden, melainkan gagasan, konsep, teori, dan nilai yang terdapat dalam teks-teks filsafat, literatur keislaman, serta kajian mutakhir tentang hoaks digital. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah sumber-sumber tertulis secara mendalam untuk membangun argumentasi konseptual yang relevan dengan tema kritik epistemik-etis Islam terhadap hoaks digital. Dalam konteks ini, hoaks tidak diperlakukan semata-mata sebagai fenomena komunikasi, tetapi sebagai problem pengetahuan dan moral yang membutuhkan pembacaan filosofis. Karena itu, pendekatan filosofis-konseptual digunakan untuk mengurai makna hoaks sebagai klaim *pseudo*-epistemik, memahami falsifikasi Popper sebagai kritik terhadap klaim yang tidak terbuka terhadap bantahan, dan menafsirkan moralitas Islam sebagai dasar tanggung jawab etis dalam menerima serta menyebarkan informasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya Karl Popper, terutama *The Logic of Scientific Discovery*, yang digunakan untuk memahami prinsip falsifikasi, kritik terhadap verifikasi, dan gagasan tentang pertumbuhan pengetahuan melalui kritik (Popper, 2002). Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber-sumber keislaman yang berkaitan dengan moralitas informasi, terutama konsep *tabayyun*, *sidq*, amanah, larangan dusta, larangan fitnah, dan

larangan menyebarkan informasi tanpa dasar pengetahuan. Pemikiran Ibn Khaldun dan Al-Ghazali juga digunakan sebagai penguat tradisi intelektual Islam dalam kritik terhadap informasi, khususnya dalam hal pemeriksaan berita, kehati-hatian epistemik, dan tanggung jawab moral. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal, buku akademik, dan hasil penelitian mutakhir tentang misinformasi, disinformasi, fake news, etika digital Islam, epistemologi sosial, dan literasi informasi digital. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas publikasi, keterbaruan kajian, dan keterkaitan langsung dengan fokus artikel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pembacaan kritis terhadap literatur yang relevan. Literatur diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok tema, yaitu literatur tentang hoaks dan disinformasi digital, literatur tentang falsifikasi Popper, literatur tentang moralitas Islam dalam verifikasi informasi, serta literatur tentang pemikiran Ibn Khaldun dan Al-Ghazali. Klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan proses pemetaan konsep dan menghindari pencampuran antara kajian komunikasi digital, epistemologi, dan etika Islam secara tidak terarah. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian kepustakaan yang tidak hanya mendeskripsikan literatur, tetapi juga melakukan interpretasi kritis dan konstruksi argumentatif terhadap gagasan-gagasan yang dikaji (Jamaluddin et al., 2025). Dengan cara ini, penelitian tidak hanya merangkum pandangan para pemikir, tetapi juga membangun konstruksi argumentatif baru berdasarkan dialog antara epistemologi Popper dan moralitas Islam.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu analisis konseptual, interpretasi filosofis, dan sintesis kritis. Analisis konseptual digunakan untuk menjelaskan pengertian hoaks digital sebagai klaim *pseudo*-epistemik, yakni klaim yang menyerupai pengetahuan tetapi tidak

memenuhi syarat epistemik berupa sumber yang jelas, justifikasi yang memadai, verifikasi, dan keterbukaan terhadap koreksi. Interpretasi filosofis digunakan untuk membaca falsifikasi Popper sebagai kritik epistemik-negatif terhadap hoaks, yaitu kritik yang menguji klaim melalui pertanyaan tentang kemungkinan salah dan keterbukaan terhadap bantahan (Popper, 2002). Adapun sintesis kritis digunakan untuk mempertemukan kritik falsifikatif Popper dengan moralitas Islam sehingga menghasilkan kerangka kritik epistemik-etis Islam. Kerangka ini menempatkan falsifikasi sebagai alat untuk menguji klaim, sedangkan moralitas Islam sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab subjek dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Validitas argumentasi dalam penelitian ini dijaga melalui konsistensi konseptual, kesesuaian antara sumber dan klaim, serta keterhubungan logis antara temuan dan kesimpulan. Setiap konsep utama tidak digunakan secara terpisah, tetapi ditempatkan dalam hubungan analitis yang saling menjelaskan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris, melainkan merumuskan kontribusi teoretis berupa model kritik epistemik-etis Islam terhadap hoaks digital. Model tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian etika informasi Islam melalui integrasi moralitas Islam dengan teori epistemologi Barat, khususnya falsifikasi Karl Popper, dalam merespons problem kebenaran, pengetahuan, dan tanggung jawab moral di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Hoaks Digital sebagai Klaim *Pseudo*-Epistemik

Analisis terhadap literatur yang relevan mengindikasikan bahwa hoaks digital tidak dapat dipahami secara simplistik hanya sebagai informasi yang salah. Dalam ekosistem digital, hoaks beroperasi dengan mekanisme yang lebih kompleks karena kerap kali mengadopsi format dan struktur pengetahuan yang absah. Ia dapat disajikan

dalam bentuk berita, kutipan tokoh berpengaruh, data statistik, citra visual, narasi berbaur ilmiah, ataupun rujukan pada sumber tertentu. Tampilan semacam ini menciptakan ilusi bahwa informasi yang disajikan memiliki landasan kebenaran, meskipun pada kenyataannya tidak ditopang oleh sumber yang transparan, bukti yang dapat diverifikasi, maupun justifikasi yang memadai. Dalam kerangka inilah hoaks dapat dikonseptualisasikan sebagai klaim *pseudo*-epistemik, yakni sebuah pernyataan yang meniru wujud pengetahuan, namun secara substantif gagal memenuhi kriteria sah sebagai pengetahuan.

Penggunaan konsep klaim *pseudo*-epistemik menjadi penting untuk membedakan hoaks dari sekadar kekeliruan informasi. Kesalahan informasi dapat timbul dari kekeliruan yang tidak disengaja, keterbatasan data, atau ketidakakuratan dalam proses penyampaian. Sebaliknya, hoaks digital sering kali memiliki arsitektur yang lebih manipulatif; ia tidak hanya menyajikan sesuatu yang keliru, tetapi secara aktif berupaya mengonstruksi kekeliruan tersebut agar tampak benar. Fenomena seperti misinformasi, disinformasi, dan *fake news* menuntut pemahaman lintas-disipliner karena melibatkan persoalan produksi pesan, dinamika penyebaran, resepsi publik, serta konsekuensi sosio-politiknya. Dengan demikian, permasalahan hoaks tidak hanya terletak pada konten pesan, tetapi juga pada mekanisme sosial yang memungkinkan pesan tersebut dipercaya (Broda & Strömbäck, 2024).

Proliferasi hoaks digital juga merefleksikan adanya erosi otoritas pengetahuan. Dalam masyarakat digital, validitas sebuah informasi sering kali tidak lagi diukur berdasarkan kredibilitas sumber, kekuatan bukti, atau proses verifikasi yang ketat, melainkan oleh kecepatan penyebaran, jumlah interaksi, kedekatan emosional, dan kesesuaiannya dengan keyakinan kolektif suatu kelompok. Informasi yang menjadi viral acapkali diperlakukan seolah-olah valid,

padahal viralitas tidak identik dengan validitas. Kondisi ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari *the fragility of truth* (rapuhnya kebenaran) dalam masyarakat yang terpolarisasi, di mana sebuah klaim pengetahuan sering kali diterima bukan karena bobot pembuktiannya, melainkan karena afiliasi sosial, penguatan identitas kelompok, dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya (Kirmayer, 2024). Dengan demikian, hoaks digital bukan sekadar masalah kesalahan faktual, tetapi telah menjadi gejala krisis epistemik dalam masyarakat.

Karakteristik utama hoaks sebagai klaim *pseudo*-epistemik terletak pada kegagalannya memenuhi sejumlah syarat epistemik fundamental. Pertama, sumber informasi yang disajikan sering kali kabur atau anonim, berlandung di balik frasa seperti “menurut ahli”, “berdasarkan penelitian”, atau “informasi dari orang dalam”, tanpa spesifikasi yang memungkinkan penelusuran lebih lanjut. Kedua, justifikasi yang dibangun lebih sering bersandar pada narasi emosional seperti memicu ketakutan, kebencian, atau harapan berlebih ketimbang argumentasi rasional yang kokoh. Ketiga, hoaks secara inheren cenderung resisten terhadap verifikasi; ketika ditantang untuk menunjukkan bukti, narasi kerap dialihkan ke pembelaan ideologis atau tuduhan konspirasi terhadap pihak yang mengkritik. Keempat, hoaks bersifat tertutup terhadap koreksi. Informasi yang secara faktual telah terbantah sering kali tetap bertahan dan bereproduksi dalam bentuk narasi baru.

Disinformasi dapat secara strategis memanfaatkan klaim objektivitas, rujukan kepada pakar, dan bahasa faktual untuk memperkuat kesan kebenarannya (Hameleers & van der Goot, 2025). Dengan kata lain, hoaks tidak selalu hadir dalam bentuk narasi mentah yang mudah digugurkan. Justru, ia bisa tampil sebagai informasi yang tampak rasional, ilmiah, atau berbasis data. Di sinilah letak daya rusaknya yang paling signifikan. Ketika hoaks berhasil membajak simbol-

simbol pengetahuan, masyarakat dapat terperdaya bukan karena abai terhadap kebenaran, melainkan karena kesulitan membedakan antara pengetahuan yang otentik dan informasi yang sekadar meniru bentuknya.

Dari temuan ini, dapat dirumuskan bahwa problem hoaks digital beroperasi pada dua level yang saling terkait. Level pertama adalah lapisan epistemik, yaitu kelemahan inheren pada klaim itu sendiri karena tidak memiliki fondasi pengetahuan yang sah. Level kedua adalah lapisan sosial, yakni bagaimana klaim tersebut diterima, didiseminasikan, dan akhirnya dipercaya oleh masyarakat. Konsekuensinya, kritik terhadap hoaks tidak akan memadai jika hanya berhenti pada upaya membantah isinya satu per satu. Kritik yang lebih fundamental harus menyorot cara kerja epistemiknya: bagaimana ia membangun ilusi kebenaran, bagaimana ia mengelak dari pemeriksaan kritis, dan bagaimana ia mengeksploitasi emosi serta identitas kelompok untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Falsifikasi Popper sebagai Kritik Epistemik-Negatif terhadap Hoaks

Dalam menghadapi hoaks sebagai klaim *pseudo*-epistemik, gagasan falsifikasi yang diartikulasikan oleh Karl Popper menawarkan sebuah instrumen kritik yang ampuh. Popper secara fundamental menolak pandangan bahwa pengetahuan berkembang melalui upaya membenaran final atau akumulasi verifikasi. Sebaliknya, menurut Popper, sebuah klaim pengetahuan harus senantiasa terbuka terhadap kritik, pengujian, dan kemungkinan untuk disalahkan. Suatu teori tidak memperoleh status ilmiahnya karena terus-menerus ditemukan bukti pendukungnya, melainkan karena ia mampu bertahan setelah diuji dan memiliki potensi untuk disangkal (Popper, 2002). Prinsip ini krusial untuk menganalisis hoaks, karena kekuatan hoaks sering kali dibangun di atas membenaran sepihak, bukan melalui keterbukaan terhadap kritik.

Falsifikasi memicu sebuah pergeseran fundamental dalam pendekatan epistemologis, dari pertanyaan “apa bukti yang mendukung klaim ini?” menjadi “kondisi atau bukti apa yang dapat menggugurkan klaim ini?” Pergeseran ini sangat signifikan dalam konteks hoaks digital. Banyak hoaks dapat bertahan karena individu cenderung mencari bukti yang mengonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada (*confirmation bias*). Jika seseorang telah memiliki prasangka bahwa suatu kelompok berbahaya, ia akan lebih reseptif terhadap informasi apa pun yang memperkuat prasangka tersebut. Dalam kondisi semacam ini, pencarian bukti tidak lagi netral, melainkan diarahkan untuk memvalidasi keyakinan awal. Falsifikasi Popper menginterupsi pola ini dengan menuntut agar setiap klaim diuji melalui kemungkinan sanggahannya.

Dalam artikel ini, falsifikasi diposisikan sebagai sebuah kritik epistemik-negatif terhadap hoaks. Istilah “negatif” di sini tidak bermakna merusak, melainkan merujuk pada modus kritik yang bekerja melalui pencarian potensi kesalahan. Kritik epistemik-negatif tidak berfokus pada bagaimana suatu klaim dapat dibenarkan, melainkan pada bagaimana klaim itu dapat diuji, dikoreksi, atau bahkan dibatalkan. Dalam konteks hoaks, pertanyaan falsifikatif dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah sumber informasi ini dapat ditelusuri dan diperiksa? Apakah bukti yang disajikan dapat diverifikasi secara independen? Adakah kemungkinan bahwa informasi ini keliru? Bersediakah penyebar informasi menerima koreksi? Apakah klaim ini akan tetap valid jika dihadapkan pada bukti tandingan? Jika sebuah informasi menolak setiap kemungkinan pengujian, maka secara epistemologis informasi tersebut sangat lemah.

Relevansi falsifikasi Popper dalam merespons berita hoaks di media sosial telah ditunjukkan, khususnya sebagai alat bantu bagi pembaca agar tidak menerima informasi secara dogmatis (Oka, 2024). Temuan tersebut penting, namun artikel ini berupaya

memperluas aplikasi falsifikasi melampaui sekadar alat pedagogis. Falsifikasi tidak hanya dilihat sebagai metode untuk melatih sikap kritis, melainkan sebagai landasan kritik epistemologis terhadap status hoaks itu sendiri sebagai klaim pengetahuan. Dengan demikian, sebuah hoaks tidak hanya dianggap keliru karena belum terbukti benar, tetapi karena ia secara inheren gagal membuka dirinya terhadap kemungkinan untuk salah.

Kekuatan utama falsifikasi dalam menghadapi hoaks terletak pada kemampuannya untuk membongkar klaim-klaim yang bersifat tertutup. Banyak hoaks beroperasi dalam logika tertutup, di mana setiap bantahan justru dapat dipelintir menjadi pembenaran baru. Jika bukti faktual menyanggah hoaks, penyebarannya bisa berdalih bahwa bukti tersebut telah dimanipulasi. Jika seorang pakar membantahnya, pakar tersebut dapat dituduh sebagai bagian dari konspirasi. Pola semacam ini menunjukkan bahwa hoaks tidak bekerja dalam logika pengetahuan terbuka, melainkan dalam logika pembenaran diri yang dogmatis. Falsifikasi menuntut hal sebaliknya: klaim yang layak dipercaya harus bersedia diuji oleh kemungkinan-kemungkinan yang dapat meruntuhkannya.

Kendati demikian, penerapan falsifikasi terhadap hoaks perlu disertai dengan beberapa catatan. Falsifikasi Popper pada mulanya dirumuskan dalam konteks filsafat ilmu untuk demarkasi antara klaim ilmiah dan non-ilmiah. Sementara itu, hoaks digital hadir dalam beragam bentuk yang tidak selalu menyerupai teori ilmiah. Oleh karena itu, falsifikasi tidak dapat diaplikasikan secara mekanis. Yang diambil dari Popper adalah prinsip kritisnya: tuntutan agar setiap klaim tidak diterima begitu saja tanpa kemungkinan pengujian. Keterbatasan lain yang lebih fundamental adalah bahwa falsifikasi berfokus pada penilaian terhadap klaim, bukan pada subjek moral yang menyebarkan klaim tersebut. Falsifikasi dapat membantu menentukan apakah sebuah

informasi terbuka terhadap sanggahan, tetapi belum menjawab apakah seseorang bertanggung jawab secara moral ketika menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Di sinilah moralitas Islam dibutuhkan untuk melengkapi kritik epistemologis Popper.

Moralitas Islam sebagai Landasan Tanggung Jawab Epistemik-Moral

Moralitas Islam hadir untuk mengisi dimensi yang tidak menjadi fokus utama falsifikasi Popper, yakni tanggung jawab moral subjek yang berinteraksi dengan informasi. Dalam pandangan Islam, informasi bukanlah entitas yang bebas nilai atau netral secara moral. Aktivitas menerima dan menyebarkan informasi terikat erat dengan nilai-nilai amanah, kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, permasalahan hoaks tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya sebuah klaim, tetapi juga oleh bagaimana seorang individu memperlakukan klaim tersebut. Pertanyaan-pertanyaan etis seperti, “Apakah saya telah memeriksa sumbernya?”, “Sudahkah saya menimbang dampaknya?”, atau “Apakah saya menyebarkannya atas dasar kebenaran atau karena dorongan emosi?” menjadi relevan. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kritik terhadap hoaks dari domain epistemologi murni ke ranah etika.

Prinsip sentral dalam moralitas informasi Islam adalah *tabayyun*, yang secara konseptual mencakup makna pemeriksaan, klarifikasi, dan kehati-hatian sebelum menerima atau menyebarkan sebuah berita. Landasan normatif prinsip ini ditemukan dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 6, yang memerintahkan orang beriman untuk memeriksa kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan kerugian pada pihak lain atas dasar ketidaktahuan. Dalam konteks digital, di mana informasi dapat beredar lebih cepat dari proses verifikasi, relevansi ayat ini menjadi sangat kuat. Kelalaian dalam

melakukan verifikasi dapat memicu dampak sosial yang luas dan merusak.

Praktik *tabayyun* dalam era digital mencakup selektivitas informasi, verifikasi sumber, kehati-hatian dalam penyampaian, serta pertimbangan mendalam atas dampak informasi sebelum disebarluaskan (Jazilah et al., 2026). Ini menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak dapat direduksi menjadi sekadar “cek fakta” teknis. Ia adalah sebuah sikap epistemik sekaligus moral: epistemik karena menuntut pemeriksaan kebenaran, dan moral karena bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, *tabayyun* berfungsi sebagai prinsip etik-epistemik dalam Islam.

Selain *tabayyun*, prinsip *sidq* (kejujuran) juga menjadi fondasi penting dalam mengkritik hoaks. *Sidq* tidak hanya bermakna tidak berbohong, tetapi juga menuntut keselarasan antara ucapan, fakta, dan niat batin. Dalam konteks digital, kejujuran tidak hanya berlaku bagi pembuat hoaks, tetapi juga bagi penyebarannya. Seseorang yang membagikan berita tanpa memastikan kebenarannya secara tidak langsung telah mengambil bagian dalam rantai kebohongan. Prinsip amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) kemudian memperkuat dimensi ini. Informasi dipandang sebagai amanah karena memiliki potensi untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan orang lain. Etika media digital berkelindan dengan maqāsid al-sharī‘ah karena informasi palsu berpotensi merusak akal, kehormatan, dan ketertiban sosial (Riyanto & Firdiansyah, 2025). Larangan berdusta (dusta) dan memfitnah (fitnah) juga menjadi pilar kritik Islam terhadap hoaks. Dalam ruang digital, batas antara menyampaikan informasi dan menyebar fitnah menjadi sangat tipis. Kajian terhadap QS. al-Ḥujurāt: 6 dan QS. al-Nūr: 15 menunjukkan betapa seriusnya Al-Qur’an memandang bahaya berita palsu karena potensinya menimbulkan prasangka, merusak relasi sosial, dan mencederai martabat manusia (Istiqomah & Amin, 2025). Hal ini

menegaskan bahwa penyebaran hoaks dalam perspektif Islam bukanlah sekadar kesalahan komunikasi, melainkan sebuah tindakan yang berpotensi melanggar nilai-nilai moral dan sosial yang fundamental.

Pada akhirnya, moralitas Islam memperluas kritik terhadap hoaks menjadi sebuah tanggung jawab epistemik-moral. Ini adalah sebuah kewajiban ganda bagi setiap individu untuk memastikan kebenaran informasi yang diterimanya, sekaligus mempertimbangkan secara saksama dampak moral dari penyebarannya. Seseorang tidak cukup hanya bertanya apakah sebuah informasi menarik atau sesuai dengan keyakinannya, tetapi juga harus bertanya: apakah informasi ini benar, apakah sumbernya kredibel, apakah penyebarannya membawa maslahat, dan apakah ia siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Dengan cara ini, moralitas Islam tidak hanya mengatur konten informasi, tetapi juga bertujuan membentuk karakter subjek pengguna informasi yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Relevansi Ibn Khaldun dan Al-Ghazali dalam Memperkuat Kritik Islam terhadap Informasi Palsu

Kritik Islam terhadap disinformasi tidak hanya berakar pada larangan-larangan normatif, tetapi juga ditopang oleh tradisi intelektual yang kaya dalam melakukan pemeriksaan kritis terhadap berita dan pengetahuan. Dalam khazanah ini, pemikiran Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menempati posisi sentral sebagai pilar yang memperkokoh fondasi kritik tersebut. Ibn Khaldun memberikan penekanan pada kritik eksternal terhadap berita dan narasi sejarah, sementara Al-Ghazali menitikberatkan pada aspek kehati-hatian epistemik, pencarian kepastian (*yaqīn*), dan purifikasi pengetahuan dari berbagai prasangka.

Dalam magnum opusnya, *al-Muqaddimah*, Ibn Khaldun mengidentifikasi beragam faktor yang dapat merusak validitas sebuah berita, seperti fanatisme kelompok,

kepercayaan yang berlebihan kepada perawi, ketidaktahuan terhadap kondisi sosial yang melingkupi sebuah peristiwa, keberpihakan, dan ketidakmampuan untuk menilai kemungkinan faktual suatu kejadian (Khaldun, 2015). Analisis ini memiliki resonansi yang kuat dengan fenomena hoaks digital kontemporer, di mana banyak informasi keliru diterima bukan karena validitasnya, melainkan karena keselarasan dengan fanatisme ideologis, sentimen keagamaan, atau kepercayaan buta terhadap figur tertentu. Ibn Khaldun mengajarkan bahwa sebuah berita harus diuji tidak hanya dari kredibilitas penyampainya, tetapi juga dari koherensinya dengan konteks sosial dan rasionalitas faktual.

Narasi sejarah perlu dinilai melalui validitas internal isinya serta kesesuaiannya dengan hukum-hukum sosial yang berlaku (Hamod, 2025). Ini berarti bahwa kritik terhadap sebuah berita tidak cukup berhenti pada analisis sanad atau rantai penyampai, melainkan harus masuk ke dalam analisis konten, konteks, dan kewajaran peristiwa. Dalam lanskap hoaks digital, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi sebuah protokol verifikasi yang mencakup pemeriksaan sumber, konteks, bukti pendukung, dan kelayakan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, Ibn Khaldun meletakkan dasar kritik historis-sosiologis yang solid terhadap hoaks.

Sementara itu, kontribusi Al-Ghazali terletak pada penekanannya terhadap kehati-hatian epistemik dari sisi subjek yang mengetahui. Dalam *al-Munqidh min al-Dalāl*, Al-Ghazali mengisahkan perjalanan intelektualnya dari skeptisisme menuju kepastian. Skeptisisme metodologis yang diusung Al-Ghazali bukanlah sebuah penolakan terhadap kebenaran, melainkan sebuah instrumen untuk membersihkan jiwa dari pengetahuan yang diterima secara taklid, berlandaskan prasangka, dan tanpa fondasi yang kokoh (McCarthy, 2000). Dalam konteks hoaks, sikap ini menjadi sangat esensial karena hoaks sering kali diterima

akibat ketergesaan dan bias konfirmasi; individu percaya bukan karena telah memverifikasi, melainkan karena informasi tersebut sesuai dengan apa yang sudah ingin mereka percayai.

Keraguan dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali bukanlah penolakan terhadap akal, melainkan suatu proses pemurnian untuk mencapai pengetahuan yang lebih terjamin kepastiannya (Saruhan, 2025). Jika diaplikasikan pada ruang digital, sikap ini dapat dimaknai sebagai dorongan untuk menahan diri (*tawaqquf*) sebelum memercayai dan menyebarkan informasi. Dalam budaya digital yang serba cepat, sikap menahan diri ini menjadi krusial. Tidak semua informasi yang diterima harus segera dibagikan. Sikap kritis dan berhati-hati justru merupakan manifestasi dari tanggung jawab keilmuan dan moral.

Secara bersama-sama, Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi kritik informasi yang kaya dan berlapis. Meskipun berasal dari konteks yang berbeda, ketiga perspektif ini keterbukaan falsifikatif Popper, kritik sosio-historis Ibn Khaldun, dan kehati-hatian epistemik Al-Ghazali dapat disinergikan dalam satu garis kritik yang sama terhadap penerimaan informasi secara dogmatis dan tidak bertanggung jawab.

Sintesis Kritik Epistemik-Etis Islam terhadap Hoaks Digital

Berpijak pada analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini mengartikulasikan sebuah kerangka kritik epistemik-etis Islam sebagai pendekatan komprehensif untuk menghadapi hoaks digital. Kerangka ini bersifat epistemik karena ia mengevaluasi status sebuah klaim informasi: apakah klaim tersebut memiliki sumber yang jelas, bukti yang dapat diuji, justifikasi yang memadai, dan keterbukaan terhadap koreksi. Pada saat yang sama, ia bersifat etis karena menilai tanggung jawab moral subjek yang berinteraksi dengan informasi: apakah individu tersebut telah bersikap jujur,

amanah, berhati-hati, dan mempertimbangkan dampak sosial sebelum menyebarkan informasi. Dengan demikian, kritik epistemik-etis Islam memadukan pengujian rasional terhadap klaim dengan pembinaan tanggung jawab moral pada diri penyebar informasi.

Sintesis ini menunjukkan bahwa falsifikasi Popper dan moralitas Islam tidak perlu dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Jika falsifikasi mengajukan pertanyaan, “Apakah klaim ini terbuka terhadap kemungkinan untuk disangkal?”, maka moralitas Islam menambahkan pertanyaan, “Apakah saya bertanggung jawab secara moral jika menerima atau menyebarkan klaim ini?” Kedua pertanyaan ini bersinergi secara efektif. Pertanyaan pertama mencegah individu menerima informasi secara dogmatis, sementara pertanyaan kedua mencegahnya menyebarkan informasi secara gegabah.

Kerangka ini, dengan demikian, melampaui pendekatan anti-hoaks konvensional yang sering kali hanya berfokus pada “cek fakta”. Cek fakta tentu merupakan komponen vital, namun tidak akan memadai jika tidak ditopang oleh etika informasi. Banyak individu tetap menyebarkan hoaks bukan karena ketiadaan klarifikasi, tetapi karena ketidakpedulian terhadap koreksi atau karena merasa informasi tersebut bermanfaat bagi kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu, problem hoaks tidak hanya membutuhkan literasi teknis, tetapi juga pembentukan karakter epistemik dan moral. Dalam terminologi Islam, kemampuan teknis memverifikasi informasi harus berjalan seiring dengan internalisasi nilai *tabayyun*, *sidq*, amanah, dan orientasi pada kemaslahatan.

Secara operasional, kritik epistemik-etis Islam ini dapat dirumuskan sebagai sebuah model konseptual yang terdiri dari empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi

klaim, yaitu mengenali apakah sebuah informasi sedang mempresentasikan dirinya sebagai pengetahuan yang absah. Tahap kedua adalah evaluasi falsifikatif, yaitu menilai apakah klaim tersebut terbuka untuk pemeriksaan sumber, bukti, konteks, dan kemungkinan sanggahan. Tahap ketiga adalah pertimbangan moral, yaitu menimbang apakah penyebaran informasi tersebut selaras dengan prinsip *tabayyun*, *sidq*, amanah, dan orientasi kemaslahatan. Tahap keempat adalah keputusan etis, yaitu secara sadar memilih untuk menahan, memverifikasi lebih lanjut, mengoreksi, atau hanya menyebarkan informasi jika telah memenuhi kriteria epistemik dan moral. Model ini menegaskan bahwa melawan hoaks bukan hanya soal mengetahui mana yang benar, tetapi juga soal menjadi subjek yang bertanggung jawab terhadap kebenaran.

Implikasi Teoretis dan Praktis Kritik Epistemik-Etis Islam

Formulasi kritik epistemik-etis Islam terhadap hoaks digital ini menawarkan implikasi teoretis yang signifikan, terutama bagi pengembangan kajian etika informasi Islam melalui integrasi antara moralitas Islam dan teori epistemologi Barat. Kontribusi penelitian ini adalah menempatkan hoaks bukan hanya dalam domain teknologi informasi, melainkan juga dalam ranah filsafat pengetahuan. Ia menunjukkan bahwa hoaks adalah problem filosofis yang berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang membuat suatu klaim layak dipercaya, bagaimana manusia membedakan pengetahuan dari *pseudo*-pengetahuan, dan mengapa klaim yang tidak terverifikasi dapat memperoleh legitimasi sosial. Dengan demikian, diskursus tentang hoaks menyentuh jantung persoalan etika informasi Islam: relasi antara kebenaran, pengetahuan, tanggung jawab, dan akhlak di ruang digital.

Secara teoretis, konsep klaim *pseudo*-epistemik membantu mengurai cara kerja hoaks yang tidak hanya mengandalkan kebohongan langsung, tetapi juga melalui

mimikri terhadap bentuk-bentuk pengetahuan. Perpaduan antara falsifikasi Popper sebagai alat kritik terhadap klaim yang tertutup dan moralitas Islam yang menempatkan subjek dalam kerangka tanggung jawab menegaskan bahwa epistemologi dan etika tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi krisis informasi kontemporer.

Implikasi praktis yang paling mendesak dari kerangka ini adalah urgensi untuk mengembangkan model literasi digital yang melampaui kompetensi teknis semata. Program literasi digital yang hanya menekankan cara memeriksa sumber atau menggunakan perangkat cek fakta belum memadai jika tidak disertai pembentukan sikap moral. Oleh karena itu, literasi digital bagi masyarakat Muslim perlu diarahkan pada pembentukan karakter epistemik-moral: kebiasaan berpikir kritis, kehati-hatian, kesediaan menerima koreksi, kejujuran, dan kesadaran mendalam bahwa setiap informasi yang disebar memiliki konsekuensi sosial.

Dalam ranah pendidikan Islam, kerangka ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memperkaya pembelajaran etika informasi. Peserta didik tidak hanya diajarkan bahwa dusta dan fitnah itu dilarang, tetapi juga dilatih untuk memahami mekanisme kerja disinformasi, cara menguji klaim, dan mengapa menyebarkan informasi tanpa verifikasi adalah sebuah kelalaian moral. Prinsip *tabayyun*, misalnya, dapat diajarkan bukan sekadar sebagai perintah agama, melainkan sebagai sebuah disiplin epistemik yang menuntut pemeriksaan komprehensif.

Aplikasi praktis lainnya menyentuh ranah dakwah digital, sebuah arena di mana informasi keagamaan kerap beredar secara terfragmentasi dan terlepas dari konteksnya. Para pendakwah, pengelola media Islam, dan komunitas keagamaan perlu menjadikan prinsip *tabayyun*, *sidq*, dan amanah sebagai landasan utama dalam produksi dan distribusi konten. Kecepatan penyebaran pesan tidak boleh mengorbankan akurasi, kejujuran, dan kemaslahatan.

Pada intinya, kritik epistemik-etis Islam menggeser fokus dari sekadar membantah hoaks secara reaktif menuju pembentukan subjek informasi yang berintegritas secara preventif dan transformatif. Subjek yang bertanggung jawab tidak hanya bertanya, “Bisakah informasi ini saya bagikan?”, tetapi lebih fundamental lagi, “Apakah informasi ini benar, bermanfaat, tidak merugikan, dan sesuai dengan prinsip amanah?” Di sinilah letak kontribusi utama kerangka ini: ia menyatukan pengujian rasional terhadap klaim dengan pembentukan akhlak informasi, sebuah perpaduan yang esensial untuk menavigasi era digital dengan bijaksana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan kesimpulan bahwa hoaks digital tidak dapat direduksi sekadar menjadi informasi yang keliru, melainkan harus dipahami sebagai klaim *pseudo*-epistemik. Konsep ini merujuk pada sebuah pernyataan yang meniru wujud pengetahuan namun secara fundamental gagal memenuhi kriteria epistemik esensial, seperti sumber yang transparan, justifikasi yang valid, keterujian, dan keterbukaan terhadap koreksi. Daya persuasif hoaks dalam ekosistem digital bersumber dari kemampuannya untuk meminjam otoritas pengetahuan melalui penggunaan format narasi faktual, kutipan tokoh, data, citra visual, atau klaim objektivitas. Oleh karena itu, problematika hoaks tidak hanya bersemayam pada kontennya yang salah, tetapi juga pada mekanisme bagaimana informasi palsu tersebut mengonstruksi ilusi kebenaran dan memperoleh legitimasi publik.

Dalam menghadapi fenomena ini, falsifikasi Karl Popper menawarkan sebuah instrumen kritik epistemologis yang relevan, terutama karena penekanannya pada keterbukaan sebuah klaim terhadap pengujian dan kemungkinan sanggahan. Melalui lensa falsifikasi, validitas sebuah informasi tidak hanya diukur dari bukti pendukungnya, tetapi juga dari kesediaannya untuk diuji melalui potensi kesalahannya.

Dalam konteks ini, falsifikasi berfungsi sebagai kritik epistemik-negatif yang efektif untuk membongkar kerapuhan sebuah klaim dengan mempertanyakan apakah klaim tersebut dapat diverifikasi, dikoreksi, dan dibantah. Hoaks, dengan demikian, terbukti lemah secara epistemologis karena keberlangsungannya lebih ditopang oleh membenaran sepihak, repetisi, dan bujukan emosional ketimbang keterbukaan terhadap kritik.

Kendati demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pendekatan falsifikasi Popper, meskipun esensial, belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas hoaks digital. Falsifikasi secara primer beroperasi pada level klaim, sementara sirkulasi hoaks juga melibatkan dimensi subjek moral yang menerima, memercayai, dan menyebarkan informasi tersebut. Pada titik inilah moralitas Islam hadir untuk melengkapi kekosongan ini melalui prinsip-prinsip *tabayyun*, *sidq*, amanah, serta larangan dusta dan fitnah. Perspektif Islam menempatkan informasi sebagai sebuah amanah yang menuntut pemeriksaan kebenaran dan pertimbangan dampak secara saksama sebelum didiseminasikan.

Konsekuensinya, penyebaran hoaks bukan hanya merupakan sebuah kesalahan epistemik, tetapi juga sebuah pelanggaran moral yang serius karena berpotensi memicu prasangka, kerusakan sosial, dan erosi kepercayaan publik.

Sumbangan fundamental dari penelitian ini, dengan demikian, terletak pada perumusan sebuah kritik epistemik-etis Islam terhadap hoaks digital. Kerangka kerja ini mensinergikan dua vektor kritik yang saling melengkapi: pengujian rasional terhadap klaim informasi dan penegakan tanggung jawab moral pada subjek yang berinteraksi dengan informasi tersebut. Falsifikasi Popper menjadi instrumen untuk menguji keterbukaan sebuah klaim terhadap sanggahan, sementara moralitas Islam menjadi kompas yang menuntun individu agar senantiasa jujur, amanah, dan

bertanggung jawab. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah etika informasi Islam dengan menawarkan sebuah model integrasi antara moralitas Islam dan teori epistemologi Barat. Secara praktis, kerangka ini dapat menjadi landasan konseptual untuk memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat Muslim, yang tidak hanya berorientasi pada kompetensi cek fakta, tetapi juga pada pembentukan karakter epistemik-moral yang kokoh.

Disadari sepenuhnya bahwa penelitian ini memiliki batasan inheren karena sifatnya yang merupakan studi kepustakaan dan konseptual, sehingga belum menguji implementasi kerangka ini dalam praktik literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang dapat mengelaborasi lebih lanjut temuan ini melalui studi lapangan, penelitian tindakan di bidang pendidikan, atau pengembangan model literasi digital yang secara eksplisit berbasis pada prinsip *tabayyun*. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperdalam dialog antara falsifikasi Popper dan pemikir epistemologi Islam klasik maupun kontemporer untuk lebih memperkuat basis filosofis bagi etika informasi Islam di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Broda, E., & Strömbäck, J. (2024). Misinformation, Disinformation, and Fake News: Lessons from an Interdisciplinary, Systematic Literature Review. *Annals of the International Communication Association*, 48(2), 139–166. <https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736>
- Gili, G., & Maddalena, G. (2022). After post-truth communication: A problematic return to reality. *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 14(1). <https://doi.org/10.4000/ejpap.2795>
- Hameleers, M., & van der Goot, E. (2025). Look at what the real facts and experts say! The use of expert references and objectivity claims in disinformation: A qualitative exploration and typology. *Journalism*. <https://doi.org/10.1177/14648849241257383>
- Hamod, M. (2025). Ibn Khaldun's Evaluation of Historical Narratives in his Muqaddimah and Comparison with the Method of the Muhaddiths TT - Ibn Haldun'un Mukaddimesinde Tarihi Rivayetleri Değerlendirmesi ve Muhaddislerin Yöntemiyle Kıyaslanması. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 499–517. <https://doi.org/10.32711/tiad.1586071>
- Istiqomah, S. N., & Amin, M. N. (2025). Pandangan Al-Qur'an terhadap hoaks perspektif tafsir maqāsidī: Studi QS. al-Hujurat: 6 dan al-Nūr: 15. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. <https://journal.kurasinstitute.com/index.php/jisnas/article/view/949>
- Istiqomah, S. N., Amin, M. N., & Ikhwanudin, M. (2025). Pandangan Al- Qur'an Terhadap Hoaks Persepektif Tafsir Maqāsidī. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 2(1), 70–80.
- Jamaluddin, M., Rahmatullah, A., & Sari, D. P. (2025). Library research methodology in education: Fundamental concepts and implementation. *Cognitive: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. <https://ejournal.arshmedia.org/index.php/cognitive/article/view/160>
- Jazilah, S., Tangareng, T., & Ulum, F. (2026). Konsep Tabayyun dalam islam: (Analisis Tematik terhadap Fenomena Informasi Digital Keagamaan). *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits*, 4(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v4i1.1334>
- Khaldun, I. (2015). *The Muqaddimah: An introduction to history* (N. J. A.-R. Dawood Franz (ed.)). Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691166285/the-muqaddimah>
- Kirmayer, L. J. (2024). The fragility of truth: Social epistemology in a time of polarization and pandemic. *Transcultural Psychiatry*. <https://doi.org/10.1177/13634615241299556>
- McCarthy, R. J. (2000). *Al-Ghazali's Path to Sufism and His Deliverance from Error: An Annotated Translation of Al-Munqidh Min Al Dal-al. Fons Vitae*. <https://books.google.co.id/books?id=1OAB>

AAAACAAJ

- Oka, I. A. P. (2024). Urgensi Teori Falsifikasi bagi Guru Untuk Menanggapi Berita Hoaks di Media Sosial. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i4.431>
- Popper, K. R. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge.
- Riyanto, M., & Firdiansyah, A. R. (2025). RECONSTRUCTING INFORMATION LAW THEORY IN CONFRONTING FAKE NEWS: AN ANALYSIS OF DIGITAL MEDIA ETHICS BASED ON REGULATION AND MAQĀ Ṣ ID AL-SHARĪ Ḥ AH. 25(2).
- Saruhan, M. (2025). Metaphysical and Phenomenological Doubt in the Search for Truth: A Comparative Study of al-Ghazālī and Edmund Husserl. *Intellectual Discourse*, 33(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.31436/id.v33i3.2342>
- Waston, M. (2025). *Filsafat Post-Truth: Krisis Kebenaran dan Tantangan Rasionalitas di Era Digital*. Muhammadiyah University Press.